

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis mengambil judul tentang **“Kebijakan Migrasi Pemerintah Mesir Terkait Penutupan Terowongan Rafah 2014”**. Alasan ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap fenomena migrasi dan keamanan di kawasan Timur tengah yang kerap kali menimbulkan konflik, khususnya di Mesir dan Palestina yang memiliki perbatasan secara langsung di kawasan Rafah yang menghubungkan antara Mesir dan Jalur Gaza. Penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan migrasi Pemerintah Mesir terhadap Terowongan bawah tanah Rafah.

Bagi Penulis pribadi, topik penulisan mengenai Kebijakan Migrasi Pemerintah Mesir Terkait Penutupan Terowongan Rafah mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konflik di Timur tengah, karena objek yang penulis teliti disini adalah “Terowongan bawah tanah” yang terkadang luput dari pemikiran orang. Isu yang penulis ambil merupakan isu kontemporer meskipun Terowongan bawah tanah Rafah ini sudah dibangun sejak lama. Kemudian topik penulisan ini pun belum pernah ditulis dan dianalisis oleh mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga kajian ini akan menjadi semakin menarik dan penulis berharap topik penulisan ini kedepannya dapat berguna bagi studi Ilmu Hubungan Internasional.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan Penulis serta Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional terkait isu keamanan migrasi pada perbatasan Mesir dan Jalur Gaza.
2. Untuk mengetahui kebijakan migrasi Pemerintah Mesir terkait penutupan terowongan Rafah.
3. Untuk mengetahui proses sekuritisasi migrasi pada Pemerintah Mesir Terkait terowongan Rafah.
4. Sebagai perwujudan atas teori-teori yang penulis terima di bangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.
5. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata (S-1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Arab Mesir, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mesir merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km<sup>2</sup> Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan

dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur.<sup>1</sup> Secara geografis Mesir memiliki perbatasan yang langsung menghubungkan dengan Jalur Gaza. Jalur Gaza sendiri adalah sebuah kawasan yang merupakan bagian dari Palestina yang terletak di pantai timur Laut Tengah, berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya, dan Israel di sebelah timur dan utara. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 kilometer dan lebar antara 6 sampai 12 kilometers, dengan luas total 365 km<sup>2</sup>, beserta Populasi di Jalur Gaza berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa.<sup>2</sup>

Mesir dan Gaza memiliki hubungan kerjasama dalam isu migrasi, hal ini terlihat dari adanya aktifitas pergerakan penduduk dari Gaza ke Mesir. Sejarah hubungan Mesir dengan Gaza dalam isu migrasi sudah berlangsung sejak lama. Pada masa pendudukan Israel di palestina dan Jalur Gaza, penduduk Palestina yang berada di wilayah jalur Gaza sudah banyak masuk ke negara Mesir. Kebanyakan dari mereka berstatus sebagai pengungsi “*Refugees*” di negara Mesir, dan sejak saat itu hubungan migrasi antara Mesir dan Palestina mulai berlangsung lebih meningkat. Para imigran dari Gaza masuk ke Mesir melewati gerbang Rafah yang menjadi pintu perlintasan perbatasan antara Gaza dan Mesir.

Para imigran Gaza masuk ke Mesir tidak secara mudah, mereka harus melewati terlebih dahulu proses migrasi pemerintah Mesir yang berada di kawasan perlintasan Rafah. Karena memang Mesir merupakan negara yang memiliki control terhadap pintu perlintasan Rafah, dimana penduduk Gaza tidak

---

<sup>1</sup> Sidik Jatmika, 2013, *Diktat Hubungan Internasional: Kawasan Timur Tengah*, Yogyakarta, UMY, hlm. 175.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 182.

bisa secara mudah keluar masuk Gaza – Mesir. Pada masa kepemimpinan Husni Mubarak, migrasi pemerintah Mesir memberlakukan pengawasan dan pengontrolan yang sangat ketat terhadap para imigran yang hendak masuk ke Mesir. Bahkan pada masa Husni Mubarak pemerintah Mesir sempat memberlakukan Blokade terhadap jalur Gaza, dimana gerbang Rafah ditutup total dalam berbagai aktifitas. Berbeda dengan masa kepemimpinan Mursi di Mesir, migrasi pemerintah Mesir memberikan kemudahan dan keleluasan kepada Imigran Gaza dalam menggunakan gerbang Rafah sebagai jalur masuk dan keluar dari Gaza ke Mesir dan dunia luar. Kemudian ketika Mesir dibawah kendali Presiden Al-sisi, kebijakan migrasi pemerintah Mesir terhadap pergerakan orang ke Mesir melalui gerbang perlintasan Rafah sangat ketat dan kuat dalam proses migrasi bagi para imigran dari Gaza ke Mesir. Bahkan terkadang pihak keamanan dan migrasi pemerintah Mesir memberlakukan penutupan dan pemblokadean terhadap gerbang Rafah. Migrasi pemerintahan Mesir pada masa Al-sisi ini serupa dengan masa Husni Mubarak.

Kebijakan migrasi pemerintah Mesir yang sering memberlakukan penutupan dan pemblokadean terhadap gerbang Rafah khususnya di masa kepemimpinan Mubarak dan Al-sisi, memunculkan respon yang kurang baik dari penduduk Gaza. Dimana penduduk dan para imigran Gaza lebih memilih masuk ke Mesir dengan cara yang tidak sah "*Illegal Entry*" tidak sesuai dengan prosedur dari Migrasi Mesir. Dalam hal ini para imigran Gaza lebih memilih Terowongan bawah tanah Rafah sebagai jalur keluar masuk Mesir dan Gaza, juga sebagai jalur penyeludupan berbagai komoditas yang dibutuhkan di jalur Gaza. Terowongan

Rafah menjadi akses rahasia bagi para imigran dan penduduk Gaza, bagi mereka melawati terowongan Rafah lebih mudah dan lebih aman dibanding melewati gerbang Rafah yang dijaga secara ketat oleh migrasi dan militer Mesir. Karena tidak semua orang bisa masuk ke Mesir jika melewati gerbang Rafah, bahkan komoditas barang-barang yang membantu proses pembangunan di Gaza pun sulit untuk masuk ketika melalui gerbang Rafah. Sedangkan terowongan Rafah tidak dijaga oleh migrasi dan militer Mesir, karena memang merupakan jalur rahasia, dan hal itu memudahkan imigran Gaza untuk menggunakannya sebagai jalur dari Gaza ke Mesir ataupun sebaliknya.

Perihal masalah Terowongan bawah tanah Rafah, Terowongan bawah tanah Rafah menjadi satu-satunya jalur bagi Imigran dan penduduk Gaza untuk pergi ke Mesir dan Dunia luar, ataupun untuk jalur penyeludupan berbagai barang dan komoditas yang dibutuhkan di jalur Gaza. Mau tidak mau imigran Gaza memang harus melewati Terowongan bawah tanah Rafah tersebut ketika ingin pergi ke Mesir maupun Dunia luar, semua itu dikarenakan gerbang Rafah yang menjadi pintu perlintasan Gaza dan Mesir ditutup dan diblokade oleh pemerintah Mesir, terlebih semua gerbang lain yang menuju Gaza sudah lama diblokade oleh pemerintah Israel.

Sebenarnya terowongan bawah tanah Rafah sudah beroperasi sejak lama, terowongan bawah tanah Rafah ini sudah ada dari tahun 1978 sejak perjanjian camp david yang ditandai dengan kedaulatan Mesir terhadap semenanjung Sinai.<sup>3</sup> Awal mula dimana Mesir bersekutu dengan Israel dan mengkhianati Palestina.

---

<sup>3</sup> Nicolas Pelham, "Gaza's Tunnel Phenomenon: The Unintended Dynamics of Israel's Siege", *Jurnal of palestines studies*, Volume XLI (2011).

Oleh karena itu Hamas dan warga Gaza pada saat itu langsung mengawali pembuatan terowongan bawah tanah Rafah, yang menghubungkan antara Gaza dan Mesir. Dari dulu sampai sekarang terowongan tersebut sering digunakan untuk penyeludupan barang dan berbagai macam komoditas yang dibutuhkan bagi warga Gaza, baik itu pangan, makanan, obat-obatan, material bangunan, bahan bakar, senjata dan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya pun ikut masuk ke Gaza melalui Terowongan bawah tanah Rafah tersebut.<sup>4</sup>

Disamping itu terowongan bawah tanah Rafah telah menjadi terowongan industri, yang dikelola oleh Hamas sebagai penguasa pemerintahan di Jalur Gaza.<sup>5</sup> Dimana ada pajak atau biaya pada setiap pengiriman barang baik dari luar Gaza ke Gaza maupun dari Gaza ke luar. Pengelolaan tersebut menjadi sumber pemasukan bagi jalur Gaza sendiri. Penggalan Terowongan bawah tanah Rafah dan aktifitas Terowongan bawah tanah Rafah semakin meningkat pada tahun 2006-2007. Pada saat Israel melakukan pemblokadean pada seluruh jalur yang menuju ke Gaza, mulai dari jalur darat, laut, maupun udara. Begitupun Mesir melakukan blokade pada gerbang Rafah. Kebijakan tersebut ditandai dengan kemenangan Hamas pada pemilu legislatif tahun 2006 di Palestina.

Keberadaan terowongan bawah tanah Rafah menimbulkan kegelisahan bagi pemerintah Mesir, dimana keamanan migrasi Mesir terancam dengan adanya terowongan Rafah tersebut. Hal demikian menimbulkan adanya ketidak stabilan pada keamanan Mesir khususnya di kawasan Rafah dan semenanjung Sinai, yang memang merupakan kawasan perbatasan antara Mesir dan Gaza. Masuknya para

---

<sup>4</sup> Dw, Terowongan Bawah Tanah Gaza, <http://www.dw.de/terowongan-bawah-tanah-gaza/g-17822171>, Diakses pada Tanggal 05 Januari 2015, pukul 15.48 WIB.

<sup>5</sup> Nicolas Pelham, *Op. Cit.*

imigran Gaza ke Mesir melalui terowongan Rafah, masuk pula masalah-masalah yang ditimbulkan oleh para imigran, seperti aktifitas illegal migration yang menghadirkan imigran gelap, penyeludupan senjata hingga pada terorisme.

Pertama, "*Illegal Migration*", aktifitas ini merupakan ancaman bagi Mesir, karena dari aktifitas ini menghadirkan adanya imigran gelap. Imigran gelap adalah seorang warga negara asing yang masuk ke negara lain tanpa melalui prosedur dan aturan yang sah dari negara yang menjadi tujuannya.<sup>6</sup> Tercatat bahwa menjelang akhir 2013 hingga 2014 ada sekitar sekitar 40.000 orang Gaza yang memakai terowongan Rafah sebagai akses ke Mesir. Otomatis mereka yang menggunakan terowongan Rafah sebagai akses ke mesir, mereka adalah para imigran gelap, karena memang terowongan Rafah bukanlah jalur resmi. Semakin meningkatnya keberadaan orang Gaza secara ilegal di Mesir, maka akan meningkat pula ancaman dan kerugian yang dialami Mesir. Dikatakan ancaman karena memang terlihat dari aktifitas para imigran gelap Gaza itu sendiri yang memang mengancam keamanan di Mesir, salah satu contohnya adalah aktifitas penyeludupannya. Kemudian dikatakan kerugian, karena tercatat bahwa banyak para imigran Gaza di mesir yang mana mereka berada pada garis kemiskinan, hampir sekitar 78 % para imigran Gaza di Mesir yang berada pada garis kemiskinan. Hal tersebut jelas menjadi ancaman bagi Mesir, karena Mesir menjadi terbebani oleh adanya para imigran gelap dan imigran miskin yang berada di Mesir.

Kedua, dengan adanya terowongan bawah tanah Rafah, hal tersebut jelas memudahkan warga Gaza dan khususnya Hamas untuk menyeludupkan berbagai

---

<sup>6</sup> International Organization for Migration, 2004, *International Migration Law: Glossary On Migration*, Swiiszerland, IOM, hlm. 34.

hal yang dibutuhkannya melalui terowongan dari Mesir ke Jalur Gaza ataupun dari Gaza ke Mesir. Terlebih penyeludupan senjata akan menjadi ancaman besar bagi keamanan Mesir. Seperti yang telah terjadi pada tanggal 10 Juli 2014, dimana Militer Mesir berhasil menyita 20 roket bersama dengan landasan peluncurannya dikawasan perbatasan Rafah, roket-roket tersebut diseludupkan melalui sebuah terowongan bawah tanah Rafah.<sup>7</sup>

Ketiga, terorisme menjadi sorotan utama dari adanya terowongan bawah tanah Rafah. Pasalnya sering terjadi konflik yang menyebabkan tewasnya para petugas migrasi Mesir dan petugas keamanan Mesir di kawasan perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan di kawasan Sinai khususnya di sepanjang perbatasan Rafah tidak stabil. Seperti pada 6 Juli 2013, di salah satu stasiun televisi di Mesir yakni Tahrir TV, secara langsung memberitakan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap penjaga pos keamanan di kawasan Rafah yang menewaskan 16 orang petugas keamanan Mesir. Militer Mesir meyakini bahwa hal itu merupakan tindakan dari para penyeludup Gaza yang diindikasikan mereka adalah anggota Hamas.<sup>8</sup> Ditambah kejadian pada tahun 2014 di bulan oktober, Mesir menyatakan keadaan darurat di Sinai dan kawasan perbatasan Rafah. Hal ini ditandai setelah serangan bom mobil bunuh diri yang menewaskan 30 militer dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan di kawasan utara Sinai Perbatasan

---

<sup>7</sup> Detik News, Otoritas Mesir Sita 20 Roket yang diseludupkan dari wilayah Gaza, <http://news.detik.com/read/2014/07/12/121051/2635266/1148/otoritas-mesir-sita-20-roket-yang-diselundupkan-dari-wilayah-gaza>, Diakses pada tanggal 9 Februari 2015, pukul 16.00 WIB.

<sup>8</sup> The Electronic Intifada, Why are Egyptian media demonizing Palestinians?, <http://electronicintifada.net/content/why-are-egyptian-mediademonizing-palestinians/12632>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2015, pukul 08.55 WIB.



Rafah. Pemboman itu dilakukan oleh tersangka jihad yang menabrak pos pemeriksaan dengan kendaraan yang dikemas bahan peledak.

Berbagai hal diatas menunjukkan bahwa ancaman dan kerugian telah datang kepada keamanan dan migrasi Mesir. Pada masalah illegal migration, keberadaan imigran gelap telah memperlihatkan bahwa mereka merupakan suatu ancaman bagi mesir, karena memang mereka masuk melalui terowongan Rafah yang tidak di control migrasi dan militer Mesir. Masuknya para imigran Gaza secara ilegal ke Mesir, membuat migrasi pemerintah Mesir tidak bisa mengetahui aktifitas apa yang dilakukan oleh para imigran gelap tersebut di Mesir. Apakah aktifitas tersebut membawa efek positif atau sebaliknya membawa efek negatif bagi Mesir. Ketika kegiatan tersebut menimbulkan efek negatif bagi Mesir, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi keamanan Mesir. Terlebih bahwa migrasi Mesir meyakini bahwa banyak dari mereka yang melakukan aktifitas penyeludupan. Bahkan senjata pun ikut diseleudupkan ke jalur Gaza melalui terowongan Rafah tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi suatu ancaman bagi keamanan Mesir. Kemudian dengan adanya penyeludupan senjata melalui terowongan Rafah, hal itu jelas menimbulkan ancaman keamanan bagi kawasan mesir khususnya kawasan Rafah dan semenanjung Sinai yang menjadi wilayah perbatasan Mesir dan Gaza. Pemerintah Mesir pun tidak mengetahui apakah senjata tersebut digunakan untuk keamanan di Gaza atau sebaliknya digunakan untuk menyerang Mesir.

Dinamika Terowongan bawah tanah Rafah pada akhir tahun 2013 hingga 2014 menjadi kunci dari isu keamanan migrasi di Mesir. Karena memang tiga contoh diatas merupakan sebagian contoh dari bentuk ancaman bagi keamanan migrasi di Mesir. Berbagai aktifitas illegal migration, penyeludupan hingga terorisme yang muncul akibat adanya terowongan bawah tanah Rafah. Menjadi suatu kegelisahan bagi pemerintah Mesir dibawah kepemimpinan Presiden Al-sisi, dimana dalam hal ini ada suatu ancaman yang merongrong keamanan migrasi Mesir. Bahkan fenomena yang ada bukan hanya menimbulkan permasalahan pada keamanan migrasi saja, namun sudah menjadi ancaman bagi keamanan negara Mesir.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, yaitu :

*Bagaimana Kebijakan Migrasi Pemerintah Mesir Terkait Penutupan Terowongan Rafah?*

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penulis disini berusaha menganalisa dan menjawab persoalan diatas menggunakan Teori “*Securitization of Migration*” dari *Philippe Bourbeau*. Teori ini merupakan teori baru, yang dibuat oleh *Philippe Bourbeau* dalam menyelesaikan disertasi nya di *University of British Columbia* pada tahun 2008, yang menganalisis tentang sekuritisasi migrasi di negara Canada dan Perancis.

### **Teori *Securitization of Migration* (Sekuritisasi Migrasi)**

Teori Sekuritisasi Migrasi merupakan teori yang membahas tentang pergerakan setiap orang yang melintasi batas wilayahnya dan suatu tatanan system yang mendasari dari pergerakan setiap orang tersebut. Teori ini berusaha untuk mengintegrasikan system migrasi kedalam kerangka kerja keamanan atau bagaimana migrasi menjadi bagian dari keamanan.<sup>9</sup> Pengertian dari teori migrasi ini memperlihatkan kepada kita bahwa dinamika migrasi pada setiap negara tidak lepas dari pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan oleh sikap dari para imigran. Terlebih ketika pelanggaran tersebut menjadi sebuah ancaman bagi migrasi suatu negara, maka perlu ada suatu pengamanan yang harus dilakukan agar migrasi dan keamanan pada suatu negara tersebut aman terkendali. Dalam hal ini teori sekuritisasi migrasi berupaya untuk memberikan pemaparan dan suatu cara terkait bagaimana migrasi suatu negara dapat dikatakan memiliki keamanan yang baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan ancaman yang datang dari para imigran negara lain dapat dibendung.

Menurut Philippe Bourbeau dalam teorinya Sekuritisasi Migrasi ini, bahwa ada lima Indikator yang terbagi kedalam dua kategori untuk melakukan sekuritisasi migrasi pada suatu negara:<sup>10</sup> Kategori pertama yakni kategori Institusi (*Institutional Category*), yang didalamnya terdapat indikator Hukum (*Legal*), Indikator Kebijakan Pemerintah (*Policy Statement*), dan *Saliency*. Kategori kedua adalah kategori Praktek atau Pelaksanaan Keamanan (*Security Practice*

---

<sup>9</sup> Philippe Bourbeau, 2011, *The Securitization Of Migration: A Study Of Movement and Order*, New York, Routledge, hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.19

*Category*), yang didalamnya terdapat indikator pencegahan/*pelarangan* (*Interdiction*) dan Indikator Penahanan (*Detention*).

### **1. Kategori Institusi (*Institutional Category*)**

“*This set of indicators offers both a binary measurement and a degree measurement*”.<sup>11</sup> Disini Philipe menyatakan bahwa kategori institusi ini merupakan serangkaian indikator yang menawarkan pengukuran tentang sekurisasi migrasi secara berpasangan. Dalam hal ini memasang atau menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya yang ada pada institusi pemerintahan, dan memang memiliki kesamaan atau memiliki korelasi antara satu dengan lainnya. Seperti memasukan indikator hukum yang tentunya terkait hukum yang berhubungan dengan keamanan migrasi. Kemudian memasukan indikator kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan keamanan migrasi itu sendiri dan didalamnya terdapat insitusi-institusi yang memiliki peran terkait keamanan migrasi. Kemudian juga memasukan indikator migrasi dan keamanan yang terintegrasikan kedalam kebijakan suatu negara. Hal ini dilibatkan dalam sekurisasi migrasi karena kategori institusi memang memiliki peran penting dalam proses keamanan migrasi itu sendiri.

#### **a. Hukum (*Legal Indicator*)**

Hukum memiliki peran dalam proses sekurisasi migrasi, tentunya hukum yang berkaitan dengan kemanan migrasi. Hukum menjadi pijakan bagi suatu negara dalam melakukan proses migrasi dan keamanan. Setiap negara yang

---

<sup>11</sup> Philipe Bourbeau, *Loc. Cit.*

memiliki hukum dan aturan tentang migrasi, negara tersebut dapat menentukan dan mengatur terkait berbagai macam prosedur keimigrasian atau terkait bagaimana seorang warga asing dapat masuk kedalam negara tujuannya hingga prosedur terkait bagaimana tindakan yang harus dilakukan migrasi pemerintah suatu negara tersebut terhadap sesuatu yang mengancam keamanannya yang timbul dari para imigran yang ada.

Mengaitkan dengan fenomena migrasi di Mesir, Mesir merupakan suatu negara yang memiliki hukum yang berkaitan dengan migrasi dan kemanan. Mesir memiliki hukum terkait "*The Law of Entry, Residence and Exit Foreigners*" ini merupakan peraturan hukum tahun 2005, dan masih diadopsi hingga sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Al-sisi. Pada peraturan ini banyak aturan yang menjelaskan tentang keimigrasian dan proses keamanan migrasi pemerintahan Mesir.

Penulis akan membenturkan kasus Terowongan bawah tanah Rafah yang menjadi akses dari para imigran Gaza dengan hukum yang ada pada Mesir. Imigran gelap yang masuk ke Mesir melalui terowongan Rafah, dapat diberikan tindakan penangkapan, penahanan hingga deportasi oleh migrasi pemerintah Mesir, hal ini dinyatakan dalam *The Law of Entry, Residenc and exit Foreignerse* pada pasal 31 yang berbunyi "Seorang warga asing dapat dikeluarkan dengan cara deportasi atas perintah dari keimigrasian, ketika seorang warga asing tersebut memasuki negara (Mesir) dengan cara illegal."<sup>12</sup> Pasal tersebut memperlihatkan dan memberikan penjabaran bahwa pemerintah Mesir memiliki hak untuk

---

<sup>12</sup> Republic Arab of Egypt, *Law no.88 of 5 May 2005* tentang "Entry Residence and Exit Foreigner".

melakukan deportasi kepada Imigran gelap dari Gaza yang masuk ke Mesir secara Illegal. Kemudian ketika kita analisis secara lebih mendalam terkait apa yang menjadi sumber dari permasalahan tersebut adalah bahwa adanya terowongan Rafah sebagai jalur rahasia bagi para imigran dan jalur tidak resmi “*Illegal Entry*” menuju Mesir menjadi akar dari munculnya pelanggaran pada keamanan migrasi Mesir.

Oleh karena itu untuk membendung terjadinya illegal migration, membendung aktifitas penyeludupan, maka migrasi pemerintah Mesir dan pihak keamanan Mesir melakukan penutupan dan penghancuran terhadap terowongan Rafah. Semua ini merupakan suatu bentuk dari pengamanan migrasi atau sekuritisasi migrasi di kawasan perbatasan Rafah yang menghubungkan antara Jalur Gaza dan Mesir. Hal ini memperlihatkan bahwa indikator hukum memiliki peran penting dalam sekuritisasi migrasi. Dimana hukum menjadi pijakan dan acuan bagi migrasi pemerintah Mesir beserta pihak keamanan Mesir dalam menutup dan menghancurkan terowongan bawah tanah Rafah.

#### **b. Kebijakan Pemerintah (*Policy Statement Indicator*)**

Migrasi memiliki hubungan yang erat dengan keamanan. Pasalnya aktifitas dalam migrasi sering menimbulkan suatu permasalahan yang kompleks yang berhubungan dengan keamanan, dimana permasalahan tersebut menjadi suatu ancaman bagi keamanan negara. Banyaknya kasus *illegal migration* yang menimbulkan adanya imigran gelap, kemudian kasus penyeludupan senjata hingga kasus terorisme transnasional yang menimbulkan keamanan pada suatu negara menjadi tidak stabil merupakan bagian dari permasalahan yang ada pada

keamanan migrasi. Sehingga migrasi saat ini telah menjadi bagian dari elemen kunci keamanan suatu negara.

Ketika migrasi menjadi bagian dari elemen kunci keamanan suatu negara. Maka hal itu berdampak terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh suatu negara, dimana kebijakan yang dibuat akan memiliki hubungan dengan migrasi, keamanan dan hubungan luar negeri. Dalam hal ini suatu negara memberikan respon terkait kondisi keamanan migrasi yang ada, sehingga kebijakan yang dibuat memiliki tujuan untuk melakukan pengamanan terhadap berbagai permasalahan keamanan yang ada dalam migrasi, atau bisa disebut sebagai proses sekuritisasi migrasi. Oleh karena itu kebijakan suatu negara menjadi indikator kedua yang memiliki peran penting dalam sekuritisasi migrasi.

Kemudian menurut philipe, bahwa untuk membantu kebijakan negara tersebut berjalan lancar dalam proses sekuritisasi migrasi. Maka perlu ada suatu departemen yang memiliki tanggung jawab untuk concern menangani permasalahan keamanan dalam migrasi. Sehingga proses sekuritisasi migrasi bisa berjalan lancar.

Menghubungkan dengan fenomena keamanan migrasi yang ada di Mesir, khususnya dikawasan perbatasan Rafah yang terdapat terowongan bawah tanah Rafah sebagai akses rahasia para imigran Gaza untuk keluar-masuk Mesir. Bahwa Mesir memiliki kebijakan terkait keamanan migrasi. Secara garis besar kebijakan pemerintah Mesir dalam fenomena keamanan migrasi memiliki tujuan untuk "*Fighting illegal migration*" atau memerangi migrasi ilegal yang memunculkan

adanya berbagai ancaman terhadap keamanan Mesir.<sup>13</sup> Tujuan kebijakan migrasi Pemerintah Mesir tersebut, terlihat dengan munculnya kebijakan Shoot-To-Stop di tahun 2007 dan kebijakan Keamanan Perbatasan di tahun 2014. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Mesir menentang keberadaan imigran gelap yang menimbulkan banyak ancaman bagi keamanan Mesir itu sendiri.

Pada proses pendampingan kebijakan tersebut, yang memang memiliki tujuan dasar sebagai suatu cara untuk melakukan sekuritisasi migrasi di Mesir. Ada beberapa departemen/kementerian dalam pemerintahan Mesir yang memiliki peran tersendiri dan ikut andil dalam proses sekuritisasi migrasi. Seperti *The Higher Committee for Migration, Ministry of Manpower and Emigration, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, dan Ministry of Defense*.<sup>14</sup> Adanya departemen-departemen tersebut menjadi suatu usaha konkrit dari pemerintah Mesir dalam proses sekuritisasi migrasi di Mesir.

### c. Saliency Indicator

Saliency secara makna bisa diartikan sebagai ketahanan ataupun kekuatan dalam mengintegrasikan antara migrasi dan keamanan. Saliency dalam hal ini terkait seberapa kuat dan seberapa terintegrasi nya migrasi dengan keamanan dalam kebijakan suatu negara. Untuk melihat terintegrasinya migrasi dan keamanan dalam kebijakan suatu negara, bisa dilihat ketika permasalahan migrasi sudah menjadi *toplist security concern* dari keamanan suatu negara, sehingga negara menjadikan isu permasalahan migrasi dan keamanan kedalam salah satu kebijakan negara yang di prioritaskan. Ketika kebijakan suatu negara

---

<sup>13</sup> Smith Angela, 2012, *Center For Migration Studies: Egypt Migration Profiles*, Cairo, The American University In Cairo, hlm. 2.

<sup>14</sup> Ayman Zohry, 2007, *Migration&Development in Egypt*, Berlin, Osnabruck University, hlm. 34.



telah memasukan isu migrasi dan keamanan kedalam salah satu kebijakan negara yang diprioritaskan, maka saliency pada negara tersebut sangat tinggi, dalam hal ini migrasi dan keamanan telah terintegrasikan secara baik dalam kebijakan suatu negara tersebut.

Migrasi dan keamanan di Mesir terintegrasikan secara baik dalam kebijakan negara, karena memang isu permasalahan migrasi di Mesir telah menjadi perhatian khusus dari keamanan negara. Pasalnya isu permasalahan migrasi di Mesir tidak hanya tentang adanya pergerakan orang secara bebas "*Illegal Migration*", namun permasalahan migrasi di Mesir lebih dari itu. Dengan adanya *Illegal migration* atau pergerakan orang secara bebas dari Gaza ke Mesir, hal demikian membuat masalah-masalah baru yang menjadi ancaman bagi Mesir, seperti adanya aktifitas penyeludupan dan terorisme di kawasan perbatasan Mesir-Gaza. Ancaman-ancaman tersebut menjadi suatu kekhawatiran bagi pemerintah Mesir, oleh karena itu pemerintah Mesir menjadikan isu permasalahan migrasi dan keamanan kedalam salah satu kebijakan negara yang di prioritaskan. Ketika sudah menjadi perioritas dari kebijakan negara, maka Mesir akan melakukan tindakan keamanan apapun untuk membendung dan mencegah masuknya ancaman ke Mesir, hingga tindakan penghancuran terowongan Rafah pun dilakukan.

## **2. Kategori Praktek Keamanan (*Security Practice Category*)**

Kategori kedua dalam sekuritisasi migrasi, yakni terkait praktek atau pelaksanaan keamanan yang berhubungan dengan keamanan migrasi itu sendiri. Pelaksanaan keamanan merupakan implementasi dalam proses sekuritisasi

migrasi. Dalam hal ini bahwa perlu ada tindakan-tindakan yang kongkrit dalam membangun sekuritisasi migrasi. Karena untuk mencapai keamanan pada migrasi suatu negara, tidak hanya dengan mengandalkan pada hukum atau kebijakan negara saja, namun turut diikuti dengan pelaksanaan keamanan. Menurut phillip bahwa ada dua praktek atau pelaksanaan keamanan yang sangat relevan dengan sekuritisasi migrasi, yakni sebuah praktek pencegahan dan pelaksanaan penahanan terhadap para pelaku illegal migration. Pencegahan dan penahanan merupakan suatu upaya untuk membendung dan mencegah illegal migration yang menimbulkan adanya ancaman terhadap keamanan negara.

**a. Pencegahan (*Interdiction Indicator*)**

Pencegahan atau Pelarangan dalam proses sekuritisasi migrasi merupakan seperangkat praktek yang berusaha untuk menghentikan aliran imigran dengan melarang, mencegat atau mengalihkan imigran yang masuk kedalam suatu negara. Dalam hal ini ada proses yang dilakukan oleh migrasi dan keamanan suatu negara dalam membendung imigran tersebut masuk karena bendungan ini dilakukan untuk mencegah masuknya ancaman keamanan kedalam negara tersebut. Sehingga terlihat bahwa ada upaya pelaksanaan keamanan dengan bentuk pencegahan untuk membangun proses sekuritisasi migrasi.

Ketika membenturkan dengan kasus keamanan migrasi di perbatasan Gaza-Mesir dan terowongan bawah tanah Rafah hal ini menjadi nyata. Karena ada tindakan praktek keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir dalam proses membangun sekuritisasi migrasi. Bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Mesir adalah berupa penutupan dan pengetatan proses migrasi di perbatasan

gerbang Rafah, kemudian pemerintah Mesir melakukan proyek pembangunan zona penyangga di wilayah perbatasan Gaza-Mesir.<sup>15</sup> Hingga pada proses penutupan dan penghancuran Terowongan Rafah yang menjadi akses para imigran Gaza dan akses bagi Hamas dalam melakukan berbagai penyeludupan. Praktek keamanan tersebut memperlihatkan bahwa ada suatu upaya dari keamanan migrasi pemerintah Mesir untuk menjaga keamanan di negara Mesir.

#### **b. Penahanan (*Detention Indicator*)**

Proses penahanan merupakan bentuk praktek keamanan kedua dalam proses membangun sekuritisasi migrasi. Ketika ada bebabagai macam imigran yang melakukan pelanggaran atau memberikan ancaman bagi keamanan migrasi negara, maka bukan hanya bentuk pencegahan yang hanya dilakukan namun bentuk penahanan pun harus dilakukan demi proses keamanan suatu negara tersebut. Penahanan dilakukan tetap dengan prosedur yang ada, dimana tetap berpijak pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Penahanan ini dilakukan dengan tujuan, agar menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan Rafah, dan terlebih untuk menjadikan hal ini sebagai efek jera bagi para pelaku illegal migration.

Migrasi pemerintahan Mesir bekerjasama dengan Keamanan Mesir yang berada dibawah kendali militer, telah melakukan penangkapan terhadap berbagai imigran gelap yang masuk melalui terowongan Rafah. Termasuk berbagai imigran yang melakukan penyeludupan melalui terowongan tersebut. Banyak dari mereka yang melakukan penyeludupan yang membahayakan keamanan di wilayah

---

<sup>15</sup> Lisa Watanabe, 2015, "Sinai Peninsula - from Buffer Zone to Battlefield", (Paper diterbitkan, CSS Analyses in Security Policy). hlm. 3.

perbatasan Mesir. Penahan pun dilakukan dengan tetap berpijak pada hukum yang ada di Mesir. Ketentuan hukum yang relevan dengan penahanan terkait isu migrasi. ada pada Law of Entry, Residence, and Exit Foreigner dan pada konstitusi Mesir tahun 2014. Tercatat bahwa sepanjang 2014 ada sekitar 130 orang telah tertangkap di kawasan perbatasan Mesir-Jalur Gaza.<sup>16</sup> Penangkapan dan penahan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan keamanan diatas merupakan bentuk dari proses sekuritisasi migrasi di Mesir.

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan keterangan dalam kerangka pemikiran dan aplikasinya, maka Penulis mengambil hipotesa bahwa kebijakan migrasi Pemerintah Mesir terkait penutupan terowongan bawah tanah Rafah 2014, merupakan bentuk dari sekuritisasi migrasi yang berlandaskan pada:

*Pertama*, indikator hukum.

*Kedua*, indikator kebijakan pemerintah.

*Ketiga*, indikator saliency.

*Keempat*, indikator pencegahan dan,

*Kelima*, indikator penahanan.

## **G. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat library research atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan

---

<sup>16</sup> Beacon, Egyptian army shoot dead Syrian migrant,wound Palestinian-Eyewitnesses, <https://www.beaconreader.com/tomrollins/egyptian-army-shoot-dead-syrian-migrant-wound-palestinian-eyewitnesses>, Diakses Pada tanggal 12 Maret 2015, Pukul 13.25 WIB.

mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun atau tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain.<sup>17</sup> Dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis.

#### **H. Jangkauan Penulisan**

Jangkauan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas, secara umum penulis membatasi penelitian pada keamanan migrasi dan kebijakan migrasi pemerintah Mesir terkait penutupan terowongan Rafah pada kisaran tahun 2005 – 2014. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mengambil referensi terkait peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terkait dan dapat mendukung penelitian dalam penulisan skripsi ini.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Maka penulis berusaha untuk menulis secara sistematis dari bab ke bab, berikut ini adalah uraian singkat yang termuat dari bab ke bab:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Singarimbun Masri, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, hlm. 12.

BAB II, penulis akan menyajikan pembahasan tentang Fenomena Migrasi Penduduk Gaza ke Mesir.

BAB III, penulis akan menyajikan pembahasan tentang Dinamika Keamanan Migrasi Perbatasan Rafah.

BAB IV, penulis akan menyajikan pembahasan tentang Sekuritisasi Migrasi Pemerintah Mesir terkait Terowongan Rafah.

BAB V, penulis nantinya akan menyajikan kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada data-data dan analisis yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.